



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

"Tema: 6 Rekayasa Sosial dan Pengembangan Pedesaan"

ANALISA PERSPEKTIF KAUM MILENIAL KABUPATEN BANYUMAS TENTANG REPRESENTASI POLITIK LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

**Noorman Rafli Bramantyo¹, Oktafiani Catur Pratiwi², Bowo Sugiarto,³ dan
Ahmad Rofiq⁴**

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email: noorman.bramantyo@mhs.unsoed.ac.id, oktafiani.pratiwi@unsoed.ac.id
(corresponding author), bowo.sugiarto@unsoed.ac.id, ahmad.rofik@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui perspektif Kaum Milenial Kabupaten Banyumas tentang representasi politik lokal dalam menghadapi Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan Pemilihan Umum yang sangat berbeda dikarenakan ada 108 juta pemula muda yang akan menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula masih sangat rentan terhadap pengaruh dari luar dalam menggunakan hak politiknya. Sehingga pemilih pemula sangat potensial menjadi massa mengambang untuk diperebutkan oleh setiap partai politik maupun calon anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap mahasiswa FISIP Unsoed yang telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap di Banyumas. Sedangkan data dokumentasi dihimpun dari pemberitaan di media online, artikel jurnal, dan buku referensi. Analisa dilakukan dengan mencocokkan data wawancara dengan data dokumentasi, dan konfirmasi jawaban informan dengan informan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama: pengetahuan representasi politik yang mereka miliki lebih besar berasal media sosial. Kedua, kaum milenial belum memiliki isu spesifik yang dianggap merepresentasikan kepentingan kaum muda milenial. Namun, mereka memiliki kegelisahan di masa depan tentang lowongan pekerjaan yang dirasa akan semakin sulit terutama dengan adanya teknologi *Artificial Intelligence*, juga tentang perubahan iklim. Ketiga, menurut anak muda, kandidat anggota legislatif yang akan mengikuti pemilihan umum 2024 belum ada yang dianggap dapat merepresentasikan anak muda dan kepentingan anak muda. Simpulan dari tulisan ini bahwa representasi politik hari ini akan sangat ditentukan hubungan wakil dan terwakil dalam



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

menstrukturasasi preferensi anak muda milenial.

Kata Kunci: Legislatif, Pemilihan Umum, Milenial, Kabupaten Banyumas, Representasi Politik

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the perspective of Banyumas Regency Millennials regarding local political representation in facing the 2024 Banyumas Regency Legislative General Election. The 2024 General Election is a very different General Election because there are 108 million young beginners who will exercise their right to vote. New voters are still very vulnerable to external influences in exercising their political rights. So that new voters have the potential to become a floating mass for every political party and legislative candidate to fight over. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data was collected through interview techniques and documentation studies. Interviews were conducted with FISIP Unsoed students who had been included in the Permanent Voter List in Banyumas. Meanwhile, documentation data was collected from reports in online media, journal articles and reference books. Analysis was carried out by matching interview data with documentation data, and confirming the informant's answers with other informants.

The results of this research show, first: their greater knowledge of political representation comes from social media. Second, millennials do not yet have specific issues that are considered to represent the interests of millennial youth. However, they have concerns in the future about job vacancies which they feel will become increasingly difficult, especially with the advent of Artificial Intelligence technology, as well as climate change. Third, according to young people, none of the legislative candidates who will take part in the 2024 general election are considered to be able to represent young people and the interests of young people. The conclusion of this article is that today's political representation will be largely determined by the relationship between representatives and representatives in structuring the preferences of young millennials.

Keywords: Legislative, General Election, Millennials, Banyumas Regency, Political Representation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan satu dari sekian negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam menganut sistem demokrasi ini, diperlukan pemilihan untuk memilih calon kepala pemerintahan, kepala daerah sebagai salah satu bentuk kesepakatan yang mufakat dan mutlak sesuai dengan hasil dalam setiap pemilihannya. Secara umum, pemilihan umum merupakan sebuah aksi nyata dalam sebuah proses demokrasi prosedural (Prasetyoningsih, 2014). Sehingga Pemilihan Umum ini menjadi alat untuk mencapai sebuah negara yang demokratis karena dilaksanakan oleh semua pihak tanpa melihat golongan, kelas, pekerjaan, kekayaan dan hal lain.

Pemilihan Umum menjadi sebuah cara untuk menempatkan wakil di legislatif terhadap terwakil yaitu masyarakat umum. Melalui Pemilihan Umum, masyarakat bisa lebih dekat, lebih mengenal dan bisa mengkategorisasikan calon wakil untuk dipilih dalam Pemilihan Umum. Pemilihan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

Umum di Indonesia dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Tahun 2004 menjadi Pemilihan Umum pertama memilih Presiden secara langsung yang saat itu dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini menjadikan pemilihan umum yang dilaksanakan dianggap lebih transparan, serta hubungan wakil dan terwakil semakin dekat sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tercipta *check and balance*.

Kabupaten Banyumas, merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 1.806.013 jiwa (Statistika, 2023). Kelompok umur 20-24 di Kabupaten Banyumas sebanyak 132.518 jiwa (Statistika, 2023). Kelompok umur 20-24 merupakan kelompok umur yang banyak menjadi pemilih baru atau pemilih pemula. Hal ini menjadikan Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan di tahun 2024 di Kabupaten Banyumas akan lebih menarik dengan para pemilih pemula.

Hadirnya pemilih pemula di Kabupaten Banyumas mengakibatkan para calon anggota legislatif di Kabupaten Banyumas harus merubah cara pendekatan kepada calon pemilih untuk memperoleh suara khususnya dari para pemilih pemula. Pendekatannya yang dilakukan harus bisa meninggalkan pola pendekatan yang sudah ketinggalan zaman dan merubah pendekatan secara kekinian. Pola pendekatan yang kekinian yaitu seperti membuat video pendek atau short movie yang di publikasikan di media sosial, lalu membentuk forum diskusi virtual atau diskusi langsung (AntaraNews, 2023). Dengan demikian, wakil harus menjalin hubungan yang baik dengan terwakil sebagai bentuk sirkulasi elit dan ekspresi berdemokrasi. Sedangkan bagi masyarakat sebagai terwakil menjadi cara pengawasan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada dasarnya wakil di legislatif merupakan sebuah representasi dari masyarakat untuk mengurus hajat masyarakat umum dalam menjalankan roda pemerintahan dengan cara-cara yang lebih kekinian dalam menarik atensi dan partisipasi dari kaum milenial.

Representasi kaum milenial kelompok umur 20-24 sangatlah sulit ditebak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari peneliti senior LIPI Syamsudin Haris, Syamsudin Haris mengatakan bahwa kaum milenial tidak dapat ditebak dan pendekatan yang digunakan harus menggunakan pendekatan kaum milenial (Suryowati, 2017). Ditambah lagi dengan hadirnya media digital dan kemudahan akses informasi mengakibatkan kaum milenial lebih selektif atau bahkan lebih apatis dengan dunia politik. Sehingga hubungan antara wakil dan terwakil menjadi berjarak dan bahkan terwakil tidak mengetahui siapa yang mewakili mereka di kursi pemerintahan terutama wakil di legislatif. Kaum milenial sebagai partisipan dalam penelitian ini masih banyak yang tidak mengetahui siapa wakil mereka di lembaga legislatif. Sehingga bentuk koneksi yang harus terbentuk antara wakil dan terwakil sebagai bentuk *check and balance* tidak dilakukan secara semestinya dikarenakan tidak adanya saling mengetahui antara terwakil terhadap wakil mereka.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

Representasi politik dilakukan oleh wakil legislatif dalam persepsi dan keinginan kaum milenial menarik ditelaah lebih lanjut dengan kerangka teoritis sebagai dasar dalam menjawab persoalan representasi politik di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, perlu dikaji penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Nuryadi Kadir dengan judul “ Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi kaum Milenial dan Gen Z (2022)”. Penelitian ini meneliti tentang representasi politik dan partisipasi politik kaum milenial dan Gen Z dalam polarisasi penggunaan media sosial. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa media sosial menjadi ruang publik baru dan kaum milenial serta Gen Z bukan hanya sebagai subyek tapi menjadi obyek dalam dinamika perpolitikan sebagai wadah baru kaum milenial dan Gen Z untuk menyampaikan aspirasi permasalahan kepada wakil mereka (Kadir, 2022). Penelitian terdahulu yang kedua berasal dari penelitian Budi Antono dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang menjadi pengaruh pilihan pemuda Kecamatan Bantarujeg dalam pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan visi misi yang visioner dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan fasilitas olahraga, kesehatan dan UMKM. Selain itu, pemilihan citra sosial, perasaan emosional, citra dari kandidat, peristiwa yang dibentuk sebelum adanya pemilihan kepala daerah dan peristiwa personal dari calon menjadikan faktor utama yang menjadi pilihan bagi para pemuda di Kecamatan Bantarujeg memilih Sobahi dan Tarsono.

Dari dua penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaan tersebut terdapat pada obyek penelitian dimana peneliti menggunakan obyek representasi politik lokal. Sedangkan lokus yang diteliti terpusat pada pemilu legislatif di Kabupaten Banyumas tahun 2024. Subyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unsoed. Secara khusus penelitian terfokus pada representasi politik anak muda milenial di Kabupaten Banyumas dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang persepsi atau pandangan anak muda milenial tentang hubungan antara wakil dan terwakil untuk memprediksi potensi suara anak muda Banyumas pada pemilu legislatif tahun 2024. Kerangka teoritis dalam menjelaskan tulisan ini adalah teori partisipasi politik. Partisipasi politik menurut Mc Closky merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan masyarakat melalui mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (Budiardjo, 2008). Selain penggunaan teori partisipasi politik, terdapat teori lain yaitu teori pilihan rasional atau *rational choice*. Menurut James Buchanan, *rational choice* atau pilihan rasional merupakan cara memilih para



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

politikus dengan mempertimbangkan unsur-unsur ekonomis sebagai hal yang akan dipilih (Anshori, 2017). Hal ini menjadi dasar untuk meneliti lebih jauh, apakah representasi kaum milenial hanya terbatas pada konseptual ekonomi politik atau memang terdapat hal lain sebagai penangkal teori dari James Buchanan mengenai *rational choice* ini. Dalam menjelaskan 2 teori sebelumnya, maka perlu adanya penggunaan teori representasi politik, representasi politik merupakan konsep yang dimana seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bisa berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar (Budiardjo, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan didukung dengan penyebaran angket untuk mendapatkan gambaran awal pemahaman partisipan tentang representasi politik, studi dokumentasi, dan observasi. Dalam proses wawancara, subyek penelitian yaitu mahasiswa FISIP Universitas Jenderal Soedirman yang sudah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data dokumentasi diperoleh dari media online, artikel jurnal dan buku referensi yang sesuai dengan topik penelitian. Data dianalisis dengan model interaktif (Miles & Huberman, --) dengan triangulasi sumber yang mencocokkan antara data wawancara informan satu dengan informan lain, juga data wawancara dengan dokumentasi, dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kaum Milenial tentang Representasi Politik

Pada Pemilihan Umum tahun 2024, kaum milenial menjadi subyek yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum.. Pemahaman tentang representasi politik menjadi suatu hal yang penting bagi kaum milenial berkaitan dengan cara mereka memilih calon wakil mereka di pemerintahan. Dalam konsep representasi yang dibawakan oleh Hannah Pitkin terdapat 4 yaitu representasi formal, representasi deskriptif, representasi substantive, dan representasi simbolik (Winarti & Nazaki, 2019). Representasi formal merupakan representasi yang mengacu pada aturan dan prosedur yang atur dan dipilih secara formal. Representasi deskriptif yaitu representasi yang merujuk terhadap kemiripan komposisi antara wakil dengan terwakil baik secara etnis atau gender. Representasi substantive merupakan representasi yang mengacu terhadap kesesuaian antara tindakan perwakilan dan kepentingan yang terwakili. Representasi yang keempat yaitu representasi simbolik yang merupakan representasi yang merujuk pada simbol pihak terwakili (Winarti & Nazaki, 2019). Dalam penelitian ini, penggunaan perspektif representasi formal atau otorisasi menjadi dasar dalam meninjau penelitian



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

ini.

Pemahaman tentang representasi politik di kalangan anak muda akan mendorong kaum dapat melaksanakan partisipasi politik dengan baik tanpa adanya campur tangan pihak lain dan tidak menjadi alat politik suatu kelompok. Secara definisi partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang mengikuti secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih kepala daerah dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2008). Dari definisi sudah jelas bahwasanya kaum milenial harus aktif dalam kehidupan politik sebagai bentuk representasi politik mereka apalagi dengan jumlah kaum milenial yang banyak pada tahun 2024 akan menjadi sasaran obyek yang utama bagi para calon legislatif di Kabupaten Banyumas.

Kaum milenial di FISIP Universitas Jenderal Soedirman sebagai partisipan penelitian ini memahami konsep representasi politik sebagai bentuk individu yang memenangi pemilihan umum sebagai alat penghubung dari masyarakat kepada pemerintah atau secara konsepnya sebagai wakil dan terwakil. Dari 29 responden, hanya 6 yang mampu menjelaskan representasi politik lebih dari sekedar wakil dan terwakil, orang yang dipilih melalui pemilu sebagai representasi dari masyarakat. Dari 6 responden, menyatakan bahwa representasi politik menjadi alat menyuarakan dan mewakili masyarakat dalam memberikan pertimbangan kebijakan yang akan diambil sehingga kebijakan yang akan diambil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga penjelasan representasi politik tidak hanya berhenti dalam lingkup wakil dan terwakil saja tetapi masuk kedalam ranah penghubung kepentingan masyarakat kepada pemerintah melalui aspirasi, masukan, dalam membentuk sebuah kebijakan publik dalam ranah dinamika politik.

Pemahaman dari 29 responden tentang fungsi representasi politik sudah sesuai dengan pemaknaan yang sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan fungsi artikulasi kepentingan yang dimiliki oleh partai politik dipahami oleh kaum milenial untuk menjelaskan tentang fungsi dari representasi politik. Fungsi artikulasi kepentingan merupakan proses penginputan sebagai suatu kebutuhan, dimana tuntutan dan kepentingan rakyat disalurkan melalui wakilnya masing-masing yang menduduki posisi legislatif, sehingga kepentingan dan tuntutan masyarakat dapat diakomodir dan terlindungi dari kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah (Kodiyat MS, 2019). Hal ini sesuai dengan jawaban dari 29 responden yang melihat bahwa fungsi dari representasi politik sebagai bentuk penyaluran aspirasi, penghubung antara masyarakat kepada pemerintah, menjaring kebutuhan masyarakat, dan menjadi alat pengontrol dari masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, pola pemahaman akan fungsi dari representasi politik sudah baik sehingga dalam realitas pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara umum kaum milenial masih kurang dalam hal literasi dan pemahaman makna dan konsep representasi politik. Hal ini menjadi permasalahan dimana aktor politik terutama kader partai



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

politik tidak melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Padahal dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik telah diatur dalam pasal 11 ayat 1 point (a) bahwa partai politik diwajibkan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, hal tersebut dimaksudkan untuk membangun perkembangan politik dan meningkatkan kesadaran politik dari masyarakat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, 2008). Hal ini yang menyebabkan para kaum milenial masih enggan untuk berdinamika dalam kehidupan politik karena secara pola pemahaman akan representasi politik yang seharusnya dipahami dan dilaksanakan masih belum dapat memahami secara mendalam. Oleh karena itu, dalam menghadapi Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Banyumas tahun 2024 menjadi suatu hal yang berbahaya dikarenakan pola pemahaman akan representasi politik oleh kaum milenial sebagai pemilih terbanyak masih minim. Sehingga kaum milenial bisa menjadi alat yang bisa digunakan oleh kandidat maupun siapapun yang berkepentingan dengan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Polarisasi Karakter Pemilih Pemula Kaum Milenial tentang Calon Legislatif Kabupaten Banyumas di Pemilihan Umum 2024

Polarisasi merupakan pembagian masyarakat dalam bagaimana cara pandang atau dukungan politik mereka (Kuncie, 2023). Hal tersebut menjadikan kaum milenial memiliki cara pandang sendiri dan berbeda dengan kaum sebelumnya baik itu cara pandang dalam melihat visi dan misi maupun cara pandang mereka terhadap personal dari calon legislatifnya. Selain itu juga dengan adanya cara pandang yang berbeda dari kaum milenial, calon legislatif untuk mendapatkan dukungan dari kaum milenial juga memiliki caranya sendiri.

Penentuan memilih calon Legislatif Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum 2024 oleh kaum milenial Banyumas bisa dilihat dari berbagai hal antara lain penggunaan media sosial, cara pendekatan yang sesuai dengan gaya anak muda serta program-program yang melibatkan anak muda. Apalagi kaum milenial memiliki berbagai akses untuk mencari beragam informasi dari para calon sebagai dasar mereka untuk menentukan pilihannya. Dari hal ini, terbentuklah polarisasi karakter yang menjadi sebuah pilihan dari kaum milenial untuk menentukan langkah untuk menentukan calon mana yang akan mereka pilih dalam Pemilihan Umum.

Menurut Barelson, perilaku pemilih merupakan proses pembentukan keputusan dan faktor sosial sebagai sebab dalam mempengaruhi pola pemberian suara dan keikutsertaan dalam Pemilihan Umum (Pajow, Pati, & Niode, 2022). Hal ini menjadi pembentukan karakter dari pemilih pemula sehingga penentuan dan pembentukan pola tidak hanya dari calon legislatif saja melainkan dari pemilih pemula itu sendiri. Apalagi dalam pemilihan umum 2024, pemilih pemula menjadi



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

kesempatan pertama bagi mereka dalam menggunakan hak suara mereka. Sehingga pembentukan karakter masih perlu dibentuk dari pemilih itu sendiri serta masih banyak hal yang perlu menjadi bekal bagi pemilih pemula agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam penentuan calon mana yang harus dipilih dalam Legislatif Kabupaten Banyumas Tahun 2024, perlu adanya hubungan mengetahui atau mengenali siapa calon yang akan maju. Namun dalam 29 responden, hanya 48,3 % atau 14 orang yang mengenali siapa anggota legislatif atau wakil rakyat mereka. Sedangkan 51,7 % atau 15 orang yang tidak mengenali siapa wakil rakyat atau anggota Legislatif mereka. Selain itu, dari 14 orang yang mengenali siapa wakil rakyat mereka, terdapat 35 % atau 7 orang yang cukup mengenali siapa wakil rakyat mereka. Wakil rakyat yang mereka kenali juga cukup sedikit yaitu hanya 3 orang. 3 orang tersebut Bapak Budhi Setiawan, Bapak Didi Rudianto, dan Bapak Ofan Sofiyon. Hal ini menjadi poin permasalahan dalam menghadapi Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dikarenakan banyak kaum milenial yang tidak mengenali siapa wakil rakyat mereka dibidang legislatif. Tidak mengenalnya kaum milenial terhadap pada calon legislatif ini akan menjadi penghambat mereka untuk melakukan representasi politik mereka.

Kurang mengenalnya kaum milenial terhadap wakil rayat mereka terutama di legislatif di Kabupaten Banyumas bukan menjadi hambatan bagi kaum milenial dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Banyumas. Ada beberapa hal yang diperoleh dari penelitian inii terkait dengan hal atau faktor apa yang menjadi pilihan kaum milenial dalam memilih wakil rakyat mereka. Faktor tersebut yaitu calon yang berjiwa nasional yang peduli akan generasi muda dan pendidikan di Indonesia, calon yang memiliki pemahaman akan teknologi dan informasi yang terbaru, calon yang revolusioner terhadap program baru yang dibawa, calon yang berpengalaman, calon yang dekat dengan rakyat dan mendengarkan suara rakyat, calon yang memiliki visi, rencana dan integritas yang nyata, calon yang dapat mengerti keresahan kaum milenial dan calon yang mengembangkan infrastruktur yang lebih baik. Polarisasi ini menjadi acuan bagia para calon legislatif untuk mencari simpati dan dukungan para calon legislatif dari kaum milenial dan bisa mengencarkan hal-hal tersebut dalam visi, misi maupun program mereka.

Kaum milenial juga mempertimbangkan faktor substansi dari calon anggota legislatif. Terdapat 93,1 % atau 27 orang yang masih melihat bahwa visi, misi, dan program kerja sebagai daya tarik untuk memilih calon legislatif atau wakil rakyat. Selain visi, misi dan program kerja, kaum milenial juga melihat bahwa *personal branding* sangat diperlukan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Banyumas sebesar 86,2 % atau 25 orang. Selain 2 hal tersebut, terdapat faktor personal kandidat yaitu riwayat pendidikan, cekatan dalam berkerja, jam terbang, partai politik pengusung, rekam jejak sebagai aktor politik, isu prioritas yang dibawa dan cara berinteraksi dengan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

masyarakat terutama kaum milenial. Faktor personal ini yang menjadi utama, karena faktor personal akan mendorong gerakan politik dari calon anggota legislatif apakah akan berpihak pada rakyat atau menguntungkan rakyat.

Permasalahan dan Polemik Kaum Milenial Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Keterbukaan informasi dan mudahnya mengakses segala hal menjadikan pemilih kaum milenial merupakan pemilih yang unik. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh calon Legislatif Kabupaten Banyumas perlu tindakan ekstra tidak seperti melakukan pendekatan pada golongan atau kelompok atau kaum yang lain. Perlu adanya modernisasi, keterikatan dan perlu daya tarik yang lebih untuk mendapatkan dukungan dan simpatisan dari kaum milenial itu sendiri. Pola-pola yang terbentuk dari kaum milenial juga bisa saja berbeda tergantung dari kaum milenialnya.

Perlunya pendekatan yang ekstra menjadikan fenomena yang baru bagi para calon Legislatif di Pemilihan Umum Tahun 2024. Menurut Milbrath dan Goel, terdapat 3 hal yang menjadi pola pikir kaum milenial yaitu 1) tipe apatis yang sangat menjauhi atau alergi akan dinamika dan kehidupan politik; 2) tipe spektator yang masih memakai haknya di kehidupan politik walaupun tidak memiliki ketertarikan lebih terhadap dunia politik; 3) tipe gladiator yang dimana tipe ini sangat aktif dalam kehidupan politik yang dalam pergerakannya seperti aktivis partai politik (Linawati, Toruan, Gumelar, & Al- Araf, 2022). Dari penjelasan dari Milbrath dan Goel ini, calon Legislatif harus bisa merubah polarisasi dan menjadi hal untuk membawa daya tarik kepada kaum milenial terutama tipe apatis dan tipe spektator. Sehingga representasi politik dari kaum milenial dapat mereka serap dan dapat mereka aplikasikan. Selain itu, bisa difungsikan sebagai bentuk *check and balance* terhadap mereka agar bekerja sesuai dengan koridornya.

Dari hasil penelitian dari 29 responden, polemik dan permasalahan yang dihadapi oleh kaum milenial Kabupaten Banyumas dalam menghadapi Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Banyumas adalah tidak mengenali siapa wakil rakyat yang akan maju. Ada 51,7 % kaum milenial dalam penelitian ini yang tidak mengenali siapa wakil rakyat mereka. Wakil rakyat yang ada saat ini belum mampu menghadirkan mereka sebagai representasi politik dari kaum milenial. Di sisi lain, ada kaum milenial yang sudah mengetahui wakil rakyatnya yang akan duduk di legislatif yaitu 42,1 % . Ini menjadi catatan bahwa fungsi representasi politik belum menyentuh dan belum berjalan dari kaum milenial. Ketika anak muda atau kaum milenial memiliki masalah, menurut 29 responden, terdapat 10,3% responden yang menjawab bahwa wakil rakyat merespon dengan baik permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap mereka. Data tersebut menyatakan bahwa wakil rakyat di legislatif masih belum bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Permasalahan yang akan menjadi polemik bagi kaum milenial dalam Pemilihan Umum



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Legislatif di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah majunya calon legislatif dari kaum muda yang masih sedikit. Dari hasil penelitian, terdapat 75,9 % atau 22 orang yang menyatakan bahwa tidak ada calon Legislatif dari kaum milenial yang akan maju dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Banyumas tahun 2024. Hal ini menjadi permasalahan karena kepentingan anak muda dianggap belum ada yang akan memperjuangkannya. Sehingga penting untuk mendudukan sebanyak mungkin anak muda sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum legislatif tahun 2024.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, perspektif kaum milenial terhadap representasi politik lokal dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 masih banyak yang perlu dibenahi oleh aktor politik, partai politik, kaum milenial dan lembaga-lembaga politik. Dimana dari hasil penelitian, masih banyak kaum milenial yang masih belum mengenali wakil rakyat mereka dalam bidang Legislatif di Kabupaten Banyumas. Selain itu, masih banyak yang hanya sekedar mengenali dan masih banyak aspirasi yang tidak dilakukan oleh wakil rakyat mereka. Sehingga, kaum milenial ini membentuk tipe politik mereka sesuai dengan Milbrath dan Goel sebagai tipe spektator. Padahal dalam Pemilihan Umum 2024, kaum milenial merupakan pemilih terbanyak yang menjadi obyek utama dari para kandidat. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas dari calon anggota legislatif agar mampu menjadi wakil dan pejuang kepentingan anak menuju Indonesia emas 2045.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unsoed atas pendanaan pada Riset Peningkatan Kompetensi serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, I. (2017). Perilaku Memilih Lembaga Pendidikan: Perspektif Teori Rational Choice dan Bounded Rational. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan: Desa Pembelajaran Di ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) UNTUK PENDIDIKAN INDONESIA BERKEMAJUAN* (pp. 136-160). Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- AntaraNews. (2023, Juni 4). Langkah Jitu KPU Rangkul Pemilih Muda Di Pemilu 2024. Jambi. <https://jambi.antaranews.com/berita/548550/langkah-jitu-kpu-rangkul-pemilih-muda-di-pemilu-2024>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *Respirokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 198-211.
- Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *Jurnal EduTech Vol. 5 No. 1*, 1-12.
- Kuncie. (2023, April 6). *Polarisasi Politik: Pengertian, Tingkat, Dampak & Contohnya di Indonesia*. Kuncie.com. <https://www.kuncie.com/posts/apa-itu-polarisasi-politik/>.
- Linawati, Toruan, R. R, Gumelar, P.I., & Al- Araf, K. (2022). Komunikasi Politik Muhammad Dwiki Ramadhani Dalam Merebut Dukungan Kalangan Generasi Milenial Pada Pemilu 2019. *Jurnal Pustaka Komunikasi Vol. 5 No. 1*, 177-189.
- Pajow,A. M., Pati, A. B., & Niode, B, (2022). Perilaku Memilih Generasi Muda Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal Eksekutif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Vol. 2 No. 2*, 1-9.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 2*, 242.
- Statistika, B. P. (2023, Maret 6). *Banyumas Dalam Angka*. <https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2023/02/28/3596aa444255c7c07b8041e0/kabupaten-banyumas-dalam-angka-2023.html>.
- Suryowati, E. (2017, November 21). *Karakter Pemilih Milenial Saat Pemilu Dinilai Sulit Ditebak*. [Nasional.kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2017/11/21/16175361/karakter-pemilih-milenial-saat-pemilu-dinilai-sulit-ditebak](https://nasional.kompas.com/read/2017/11/21/16175361/karakter-pemilih-milenial-saat-pemilu-dinilai-sulit-ditebak)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Winarti, N., & Nazaki (2019). Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 04 No. 01*, 112-122.